

ABSTRAK

Bentuk penyimpangan keuangan negara yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang cukup besar biasanya akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah untuk: 1) Menganalisa dan mendeskripsikan peran jaksa pengacara negara untuk memulihkan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kota Tegal. 2) Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala dan solusi terkait peran jaksa pengacara negara untuk memulihkan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kota Tegal.

Tesis ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang dalam hal ini berkaitan dengan peran Jaksa Pengacara Negara dalam memulihkan kerugian keuangan negara dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori keadilan dan teori kemanfaatan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran Jaksa Pengacara Negara Tegal dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara dapat ditinjau dalam teori pengembalian aset dan teori keadilan yang merupakan bagian terpenting dalam mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara. pengembalian aset keuangan negara yang diupayakan oleh Jaksa Pengacara Negara Kota Tegal melalui upaya penyitaan maupun perampasan *asset* negara telah sesuai dengan perspektif keadilan. Mengacu pada teori keadilan dan kemanfaatan dengan meletakkan tanggungjawab pidana serta perdata kepada pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya diharapkan kerugian keuangan negara yang terjadi akibat perbuatan tersebut dapat dikembalikan seutuhnya sebagai bentuk keadilan terhadap pelaku, negara dan masyarakat yang dirugikan. Sedangkan dari segi kemanfaatan maka pengembalian kerugian keuangan negara merupakan sistem penegakan hukum yang sangat baik secara pidana maupun perdata, sekaligus mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset yang dihasilkan dari korupsi sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya.

Kata Kunci : Peran, Jaksa Pengacara Negara, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Forms of irregularities in state finances that result in substantial financial losses to the state are usually the result of criminal acts of corruption committed by irresponsible people. Corruption is very detrimental to state finances or the country's economy and hinders national development, so it must be eradicated in order to create a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

The research objectives in this study are to: 1) Analyze and describe the role of state attorneys to restore state finances in criminal acts of corruption by the Tegal City District Attorney. 2) To know and analyze the obstacles and solutions related to the role of state attorneys and state attorneys to restore state finances in criminal acts of corruption by the Tegal City District Attorney.

This thesis uses a sociological juridical approach, which in this case relates to the role of the State Attorney General in recovering state financial losses with analytical descriptive research specifications. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problems were analyzed using the theory of justice and the theory of expediency.

The results of the study conclude that the role of the Tegal State Attorney General in efforts to recover state financial losses can be reviewed in the theory of return on assets and theory of justice which are the most important parts in seeking to recover state financial losses. The return of state financial assets that has been attempted by the Tegal City State Attorney through efforts to confiscate or seize state assets is in accordance with the perspective of justice. Referring to the theory of justice and benefit by placing criminal and civil responsibility on the perpetrators of criminal acts of corruption and their heirs, it is hoped that the state financial losses that occur as a result of these acts can be fully returned as a form of justice for the perpetrators, the state and the community who have been injured. Meanwhile, in terms of benefits, the recovery of state financial losses is a system of law enforcement that is very good both criminal and civil, as well as preventing the use or utilization of assets resulting from corruption as a tool or means by the perpetrators of corruption to commit other crimes.

Keywords: Role, State Attorney, Corruption Crime